



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DKI Kembali Didesak Buka Rincian Anggaran

Ketertutupan dianggap memberi peluang bagi penyusupan anggaran janggal.

### Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

**JAKARTA** – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pegiat keterbukaan anggaran kembali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka semua rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI, William Aditya Sarana, mempertanyakan alasan pemerintah Jakarta menunda penayangan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di situs web [apbd.dkijakarta.go.id](http://apbd.dkijakarta.go.id). Menurut dia, keputusan itu justru membuka peluang bagi masuknya usul program janggal dengan anggaran yang tak masuk akal.

William menerangkan, DPRD hanya punya

kesempatan terbatas untuk menyisir usulan anggaran senilai Rp 85 triliun tersebut, yakni hingga 30 November mendatang. “Kami memerlukan bantuan masyarakat,” kata dia, kemarin. “Kalau di *publish* setelah disepakati dengan DPRD, akan percuma karena sudah sah.”

Dengan pembahasan KUA-PPAS yang dilakukan secara maraton, menurut William, program-program janggal berpotensi besar lolos karena keterbatasan waktu dan kelelahan anggota Dewan. “Anggota DPRD jumlahnya sedikit, waktunya mepet,” ujarnya.

Fraksi PSI, kata William, telah berulang kali meminta salinan dokumen Rancangan APBD 2020 ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Dokumen tersebut baru diberikan Bappeda pada 16 September lalu. Itu pun hanya berupa susunan anggaran hingga level kegiatan, tanpa rincian komponen anggarannya.

Permohonan PSI meminta semua rincian komponen anggaran belum ditanggapi hingga saat ini.

Bappeda, William melanjutkan, memang pernah dua kali mengunggah dokumen Rancangan KUA-PPAS ke situs web [bappedadki.go.id](http://bappedadki.go.id). Namun Bappeda dua kali juga menghapus dokumen tersebut dari jangkauan publik tanpa alasan yang jelas.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, juga mengklaim mendapat penolakan dari Bappeda ketika meminta dokumen Rancangan APBD 2020 yang tak kunjung muncul di *website* resmi. “Kesengajaan menutup akses informasi sangat janggal di era pemerintahan yang seharusnya transparan dan akuntabel,” ujar dia.

Penutupan akses informasi rencana anggaran, menurut Misbah, tidak selaras dengan sikap Gubernur Anies Baswedan

yang menegur para pejabat DKI ketika dia mengetahui banyaknya usul anggaran aneh dalam Rancangan APBD 2020.

Pada 23 Oktober lalu, Anies memang mengumpulkan semua kepala satuan kerja perangkat daerah. Gubernur tak hanya membeberkan sejumlah usul anggaran yang aneh. Dia juga meminta para pejabat itu menyisir kembali anggaran di instansinya dan menghapus usul yang tidak masuk akal.

“Jangan diulangi lagi. Perbaiki segera. Saya tak mau ada anggaran yang disisip-sisipi (siluman). Kalau tak bisa, Anda *out* (diberhentikan). Tolong diperhatikan,” kata Anies dalam rekaman video berdurasi lebih dari satu jam yang diunggah ke YouTube itu.

Dua hari lalu, kepada wartawan, Anies mengatakan anggaran aneh-aneh itu bisa lolos karena kelemahan sistem penganggaran elektronik (*e-budgeting*). Sistem itu, menurut dia,

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DKI Kembali Didesak Buka Rincian Anggaran

tak bisa otomatis mende-  
teksi dan memverifikasi  
usul anggaran yang tidak  
masuk akal.

Anggota Fraksi Partai  
Demokrasi Indonesia  
Perjuangan, Ima Maidah,  
mengatakan lolosnya ang-  
garan janggal ke dalam  
Rancangan APBD 2020  
bukan karena kelemahan  
sistem *e-budgeting*. Sistem  
*e-budgeting* DKI Jakarta  
sudah bagus. Hal ini ter-  
bukti pada penyusunan  
anggaran era gubernur  
sebelum Anies yang trans-  
paran dan akuntabel.

Anggaran janggal  
bisa lolos, menurut Ima,  
lebih mungkin lantaran  
kesalahan orang di balik  
sistem *e-budgeting*. Pejabat  
yang ditugasi memasukkan  
data bisa saja melakukan  
kesalahan, baik disengaja  
maupun tidak. Di samping  
itu, kata dia, anggaran  
aneh bisa lolos jika peng-  
awasan oleh gubernur dan  
pejabat pengawas lainnya  
lemah. "Sehebat apa pun  
sistemnya, tanpa peng-  
awasan atau ada *human*  
*error*, hal itu (anggaran  
aneh) akan tetap ada,"  
ucapnya.

● TAUFIQ SIDDIQ | IMAM HAMDJ

## Gusar Tersebab Anggaran Janggal

**G**UBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan sejumlah anggaran aneh yang tercantum dalam ran-  
cangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon  
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Anggaran aneh itu, di  
antaranya, diposkan untuk rencana pembelian alat tulis kantor  
yang pada 2020 dianggarkan Rp 1,6 triliun. Adapun anggaran  
pembelian alat tulis kantor tahun ini sebesar Rp 349 miliar.

Anies pun meminta para pejabat satuan kerja perangkat  
daerah (SKPD) menyisir ulang semua anggaran tak masuk akal  
di instansinya. "Yang tidak perlu-perlu itu, Bapak-Ibu sekalian  
*hapusin*," kata Anies dalam rekaman video pertemuan pada 23  
Oktober 2019 yang diunggah di YouTube. Tak hanya itu, Anies  
mengisyaratkan akan mencopot pejabat SKPD yang tetap melo-  
loskan usul anggaran yang tak masuk akal dalam Rancangan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020.

Berikut ini sejumlah temuan kejanggalan anggaran yang  
diungkap Anies.

- » Pembelian kertas F4, A4, dan folio **Rp 213** miliar
- » Pembelian tinta printer **Rp 400** miliar
- » Pembelian Stabilo **Rp 3,7** miliar
- » Pembelian laser pointer **Rp 5,9** miliar
- » Pembelian penghapus **Rp 31** miliar
- » Pembelian bolpoin **Rp 635** miliar
- » Pembelian kalkulator **Rp 31** miliar

● GANGSAR PARIKESIT